

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu wilayah dilihat dari sejauh mana pembangunan ekonomi berjalan di daerah tersebut. Pembangunan ekonomi menjadi salah satu aspek penting yang harus dilaksanakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi sebuah daerah sangat bergantung pada keselarasan antara rencana dan pelaksanaan. Ketika upaya pembangunan ekonomi berjalan sesuai dengan rencana dan pelaksanaannya, kesejahteraan masyarakat akan tercapai dan meningkatkan kualitas hidup serta menciptakan stabilitas di wilayah tersebut.

Di era globalisasi saat ini, para pelaku usaha dihadapkan pada berbagai tantangan dalam memulai dan mengembangkan bisnis. Para calon pelaku usaha harus menyiapkan berbagai hal penting, terutama masalah modal yang cukup. Keterbatasan modal menjadi penghalang utama bagi banyak pelaku usaha, terutama bagi mereka yang baru memulai. Dengan berkembangnya teknologi dan ekonomi global yang semakin pesat, kebutuhan akan dana untuk mendukung kegiatan ekonomi semakin besar. Oleh karena itu, adanya akses terhadap pinjaman dan layanan keuangan lainnya, pelaku usaha dapat lebih mudah mewujudkan tujuan mereka dalam dunia usaha.

Menurut Wiwoho (2020), lembaga keuangan merupakan badan usaha yang bergerak dalam dunia keuangan dengan tujuan menyediakan layanan bagi nasabah atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, lembaga keuangan didefinisikan sebagai

semua entitas yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat, dengan tujuan untuk mendukung pembiayaan investasi.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu lembaga keuangan di Provinsi Bali yang dikelola oleh komunitas desa adat di Bali dan didirikan sebagai badan usaha milik desa (Sari, 2020). Keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa dapat dilihat dari aspek pengelolaan, kinerja keuangan, dan peran dalam menggerakkan sosial ekonomi masyarakat pedesaan (Dwipayana & Sujana, 2024). Dasar pembentukan LPD telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 972 Tahun 1984. Kemudian, landasan hukum LPD mengalami beberapa perubahan, dan perubahan terbaru yang mengatur tentang LPD diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 menegaskan posisi LPD sebagai lembaga keuangan milik Desa Pakraman.

Sistem pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pada hakikatnya bersumber dari hukum adat Bali. Seiring berjalannya waktu, sejumlah LPD di berbagai desa adat telah mengelola LPD-nya secara efektif, sehingga menjadi sumber pendapatan desa. Akan tetapi, kelangsungan hidup LPD di Bali dapat terhambat karena beberapa LPD menunjukkan kondisi yang tidak sehat dan tidak beroperasi (macet). Masalah ini sebagian besar disebabkan oleh faktor internal, salah satunya adalah kurang optimalnya layanan kredit. Akibat banyaknya piutang, layanan perkreditan tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan masalah bagi LPD.

Peningkatan jumlah unit LPD di Bali menunjukkan perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu. Sejak pertama kali berdiri dengan hanya 8 unit pada

tahun 1984, jumlah LPD di Bali telah meningkat menjadi 1.439 unit pada tahun 2023, tersebar di sembilan kabupaten/kota. Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan LPD dalam memberikan layanan keuangan yang diterima oleh masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, meskipun jumlahnya terus meningkat, tidak semua LPD berada dalam kondisi yang sehat atau berkembang dengan baik. Berdasarkan data dari Pansus LPD DPRD Provinsi Bali, tercatat sebanyak 153 LPD (10,63%) di Bali dinyatakan tidak beroperasi atau bangkrut. Selain itu, terdapat 42 LPD (2,92%) yang digolongkan sebagai LPD tidak sehat. Sementara itu, jumlah LPD yang tergolong sehat mencapai 1.126 unit atau sekitar 78,25% dari total keseluruhan, berikut adalah distribusi kondisi LPD berdasarkan kabupaten di Bali:

Tabel 1.1 Kondisi LPD di Bali

No	Kabupaten	Total LPD	Data Kesehatan		
			Tidakoperasi	Tidak Sehat	Sehat
1	Tabanan	311	54	8	249
2	Gianyar	270	31	15	224
3	Buleleng	169	25	3	106
4	Karangasem	190	24	2	164
5	Badung	122	8	4	110
6	Bangli	159	6	2	91
7	Klungkung	119	4	1	114
8	Jembrana	64	1	3	51
9	Denpasar	35	0	4	17
Total		1.439	153	42	1.126

(Sumber: *balitribune.com*)

LPD Desa Adat Banjar Tengah yang terletak di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. LPD Desa Adat Banjar Tengah merupakan lembaga keuangan yang terus beroperasi dengan lancar dan aktif memberikan kredit. LPD Desa Adat Banjar Tengah dipilih sebagai subjek penelitian karena jumlah piutang tak tertagihnya tergolong rendah jika dibandingkan dengan LPD lain di Kecamatan Negara. LPD Desa Adat Banjar Tengah digolongkan sehat dengan memiliki aset sebesar 489 juta dan laba sebesar 43 juta, LPD Desa Adat Banjar Tengah hanya menawarkan dua produk keuangan, yaitu tabungan dan simpan pinjam (kredit). Dalam penyaluran kredit, LPD Desa Adat Banjar Tengah menggunakan prinsip 5C yakni, *Character* yaitu watak, *Capacity* yaitu kemampuan, *Capital* yaitu modal, *Collateral* yaitu agunan, dan *Condition of economy* yaitu kondisi perekonomian. Apabila informasi yang dihasilkan melalui penerapan akuntansi memadai dalam mendukung pertumbuhan LPD, khususnya pada proses pemberian kredit, maka dapat membantu meminimalisir risiko kredit macet dan menjaga kelancaran perputaran modal LPD (Putri & Atmadja, 2020). LPD ini didirikan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat desa. LPD Desa Adat Banjar Tengah memiliki pendekatan unik melalui cara pengelolaannya, yang menggunakan instrumen komunikasi dan sosial budaya, seperti awig-awig, pesangkepan dan dengan tidak memberikan sanksi berat kepada debitur yang telat membayar, melainkan mengadakan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, LPD Desa Adat Banjar Tengah mengoperasikan sistem informasi akuntansi secara efisien untuk meminimalkan kesalahan dalam pemberian pinjaman dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan di LPD Desa Adat Banjar Tengah, jumlah kredit lancar lebih tinggi dibandingkan dengan kredit tidak lancar. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi yang tepat dapat membantu meminimalkan potensi masalah atau hambatan, sehingga mengurangi jumlah kredit macet. Namun, meskipun jumlah kredit lancar lebih tinggi, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan sistem informasi akuntansi, seperti keterbatasan SDM yang belum sepenuhnya terampil dalam mengoperasikan sistem, keterbatasan infrastruktur teknologi yang menyebabkan proses pengambilan keputusan terkadang terhambat. Selain itu, masalah terkait akurasi data dan keamanan informasi juga menjadi tantangan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan efektivitas SIA dalam mendukung pemberian kredit yang lebih baik.

Menurut Endiana (2021) Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyajikan informasi keuangan yang relevan dan akurat. Sistem informasi akuntansi mendukung pihak manajemen dalam mengatur organisasi yang berkaitan dengan aspek keuangan (Julianto & Yasa, 2019). Sistem informasi akuntansi akan memberikan keuntungan jika sistem tersebut beroperasi dengan kinerja yang optimal (Ardyani & Yuniarta, 2022). Sistem informasi akuntansi ini sangat penting bagi semua pelaku usaha, termasuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD), sebuah lembaga usaha milik desa yang berperan penting dalam mendukung krama desa dengan memberikan bantuan kredit dan memfasilitasi kegiatan menabung. Keberhasilan penerapan SIA sangat dipengaruhi oleh unsur manusia, dan sebagai

penyedia informasi, SIA selalu terkait dengan peran manusia dalam organisasi tersebut (Rahmansyah & Darwis, 2020).

Adapun beberapa penelitian sebelumnya pernah melakukan analisis dan penelitian tentang penerapan sistem akuntansi. Ginting (2024), menyebutkan penerapan sistem informasi akuntansi dalam pemberian kredit menunjukkan bahwa sistem ini berperan penting dalam mendukung kelancaran aktivitas bank. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, dapat mencegah kesalahan yang merugikan dan memastikan pemberian kredit yang sehat. Selain itu, sistem ini juga membantu dalam analisis kredit yang baik, sehingga memudahkan pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan kredit dari nasabah. Selanjutnya Pasaribu (2023), menyebutkan sistem informasi akuntansi memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberian kredit di PT. BPR Solider Medan, karena sistem ini menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk mengolah dan menganalisis data keuangan calon debitur, sehingga memungkinkan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan terinformasi. Penerapan sistem ini juga meningkatkan efisiensi proses pengambilan keputusan, karena memungkinkan untuk mempercepat analisis dan persetujuan kredit.

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti penerapan sistem informasi akuntansi dalam pemberian kredit di lembaga keuangan. Namun, penelitian yang secara spesifik menganalisis bagaimana peran sistem informasi akuntansi dalam mendukung pengambilan keputusan pemberian kredit di LPD masih terbatas. Selain itu, kendala yang muncul dalam penerapan sistem informasi akuntansi ini belum terdefiniskan.

Gambaran penerapan sistem informasi akuntansi di LPD ini diperoleh melalui sebuah penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Penunjang Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit (Studi pada LPD Desa Adat Banjar Tengah Kecamatan Negara)”. Alasan mengenai pengambilan topik ini karena meskipun beberapa LPD telah menggunakan sistem informasi akuntansi, masih terdapat kendala dalam optimalisasi sistem tersebut, yang berpotensi memengaruhi kualitas pengambilan keputusan kredit.

1.2 Identifikasi Masalah

LPD Desa Adat Banjar Tengah merupakan salah satu Lembaga Perkreditan Desa yang telah menerapkan sistem informasi akuntansi dalam operasionalnya. Dengan penerapan yang baik, LPD Desa Adat Banjar Tengah mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efisien, terutama dalam hal pemberian kredit. Namun, meskipun sistem informasi akuntansi sudah diterapkan, masih terdapat batasan pegawai dalam memanfaatkan sistem untuk analisis kredit secara maksimal dan kurangnya pemahaman masyarakat desa pakraman Banjar Tengah mengenai prosedur pengajuan kredit, yang menyebabkan kebingungan dalam pengurusan berkas-berkas pinjaman.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi dan merangkum masalah yang terkait dengan topik yang diteliti. Hal ini dikarenakan topik tersebut memiliki cakupan yang relatif luas dan potensi keterkaitan dengan isu-isu lainnya. Dengan demikian, dengan menggunakan studi kasus LPD Desa Adat Banjar Tengah, penulis memilih untuk menyoroti bagaimana SIA digunakan dalam proses analisis

pemberian kredit dan pengambilan keputusan, serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka perumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada LPD Desa Adat Banjar Tengah dalam mendukung proses pengambilan keputusan pemberian kredit?
2. Apa sajakah kendala yang dialami saat penggunaan sistem informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan pemberian kredit pada LPD Desa Adat Banjar Tengah?
3. Bagaimanakah solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan sistem informasi akuntansi terkait pengambilan keputusan pemberian kredit pada LPD Desa Adat Banjar Tengah?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Mengetahui penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada LPD Desa Adat Banjar Tengah dalam mendukung proses pengambilan keputusan pemberian kredit.
2. Mengetahui kendala yang dialami saat penggunaan sistem informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan pemberian kredit pada LPD Desa Adat Banjar Tengah.

3. Mengetahui solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan sistem informasi akuntansi terkait pengambilan keputusan pemberian kredit pada LPD Desa Adat Banjar Tengah.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengembangan ilmu ekonomi pada bidang akuntansi terkait penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pengambilan keputusan pemberian kredit, khususnya di Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi LPD Desa Adat Banjar Tengah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi praktis mengenai penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang lebih efektif dalam mendukung pengambilan keputusan pemberian kredit pada LPD Desa Adat Banjar Tengah.

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan bahwa melalui studi ini, akan diperoleh pemahaman mengenai penyediaan kredit publik dan bagaimana penerapannya berhubungan dengan LPD dalam konteks sistem informasi akuntansi.

- c. Bagi Peneliti Lainnya

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi peneliti lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih

mendalam mengenai penerapan dan kendala dalam penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di lembaga keuangan desa seperti LPD. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan antara teori yang dipelajari di kelas dengan praktik yang ditemukan di lapangan, serta sebagai informasi tambahan atau acuan untuk penelitian selanjutnya.

